

# **DETERMINAN PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH INDONESIA**

**Lia Yuanisa**

Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia  
liayuanisa@gmail.com

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komite audit independen, dewan komisaris independen dan karakteristik dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan kajian terdahulu telah banyak penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko di perusahaan maupun di perbankan Indonesia, terutama tentang pengungkapan manajemen risiko. Namun masih sedikit penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional di Bank Umum Syariah Indonesia.*

*Populasi penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah yang berjumlah 13 bank yang memiliki laporan tahunan periode 2014-2018. Indeks pengungkapan risiko operasional yang terdiri dari 45 item disusun berdasarkan peraturan OJK dan literatur terdahulu yang membahas pengungkapan risiko operasional. Metode analisis data adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan mempunyai dampak positif terhadap pengungkapan risiko operasional. Sedangkan variabel komite audit independen, dewan komisaris independen dan karakteristik dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional.*

**Keywords:** *pengungkapan risiko operasional, bank umum syariah.*

## **PENDAHULUAN**

Bank-bank Islam mengalami perkembangan pesat yang diikuti semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko. Kasus risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional dimana disebabkan oleh tantangan yang kompleks, fitur kontrak dan lingkungan hukum (Barakat dan Hussainey 2013). Berdasarkan teori agensi klasik, pemegang saham dan deposan akan cemas akan dana yang mereka investasikan di bank-

bank syariah. Karena setiap penyimpangan dan penempatan seluruh dana untuk investasi oleh bank syariah akan menciptakan masalah agensi antara pemegang saham dan deposan, serta meningkatkan risiko operasional. Hal ini mengakibatkan manajemen tidak hanya melakukan pengungkapan tentang manajemen risiko tetapi menambahkan informasi lain yaitu risiko operasional. Maka tidak heran jika permintaan untuk pengungkapan risiko dari pemangku kepentingan meningkat.

Berdasarkan kajian terdahulu telah banyak penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko di perusahaan dan perbankan di beberapa negara Islam (Abdallah, Hassan dan McClelland 2015; Ashfaq *et al.* 2016; Al Maghzom, Hussainey dan Aly 2016; Nahar, Azim dan Jubb 2016; Ellili dan Nobanee 2017; Rosli, Mohammed dan Sanusi 2017; Khalil dan Maghraby 2017; Alkurdi *et al.* 2019; Elamer *et al.* 2019). Beberapa kajian yang sama dilakukan juga oleh peneliti Indonesia (Achmad dan Faisal 2017; Aryani dan Hussainey 2017; Wicaksono dan Adiwibowo 2017; Falendro, Faisal dan Ghozali 2018; Hasina, Nazar dan Budiono 2018; Sarwono, Hapsari dan Nurbaiti 2018; Susanti, Isbanah dan Kusumaningrum 2018). Kajian terdahulu lebih banyak meneliti tentang pengaruh tata kelola dengan pengungkapan seluruh risiko termasuk manajemen risiko dengan menggunakan pendekatan indeks pengungkapan (Linsley and Shrives 2005).

Pengungkapan risiko operasional di perbankan syariah sangat penting diberikan untuk meningkatkan legitimasi dan mengelola persepsi pemangku kepentingan tentang reputasi perusahaan (Oliveira, Rodrigues dan Craig 2011). Selain itu, menurut Malim (2015), risiko operasional mulai mendapatkan perhatian lebih seiring tren yang mengarah pada ketergantungan teknologi, kompetisi antar bank-bank dan globalisasi industri perbankan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan faktor-faktor yang mempunyai

pengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional antara lain sistem tata kelola dua tingkat dan kepemilikan pemerintah (Ameer 2018), kepemilikan terkonsentrasi (Al Maghzom *et al.* 2016; Ashfaq *et al.* 2016), independensi dewan direksi (Ameer 2018; Neifar dan Jarboui 2018), komite audit (Al Maghzom *et al.* 2016; Ashfaq *et al.* 2016; Alkurdi *et al.* 2019), sedangkan Dewan Pengawas Syariah menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional di bank syariah (Neifar dan Jarboui 2018).

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, kali ini lebih spesifik menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Sekaligus mengembangkan penelitian terkait pengungkapan risiko operasional di bidang akuntansi syariah yang belum banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang diprediksi mempengaruhi pengungkapan risiko operasional antara lain Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Landasan Teori**

#### ***Teori Pemangku Kepentingan***

*Stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Menurut Elamer *et al.* (2017), perbankan syariah dalam hal ini dituntut bertanggungjawab kepada para pemangku kepentingan secara luas tidak hanya semata-mata pada nilai moneter, tetapi juga pada tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Perbankan syariah harus mengungkapkan

informasi mengenai kebijakannya, terutama tentang jenis risiko dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai harapan para pemangku kepentingan. Salah satu strategi dalam menjaga hubungan dengan *stakeholder* adalah melakukan pengungkapan, atau dengan kata lain teori ini menekankan akuntabilitas dibandingkan dengan kinerja ekonomi.

Perbankan harus membuat pemangku kepentingan puas dengan tindakan perusahaan karena jika pemangku kepentingan tidak puas maka mereka dapat mengurangi partisipasi dalam perusahaan atau menarik diri (Khalil dan Maghraby 2017). Para pemangku kepentingan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang aktivitas-aktivitas perusahaan yang dapat berpengaruh pada *stakeholder*. Penelitian tentang pengungkapan oleh perusahaan menunjukkan adanya peran pemangku kepentingan dalam mempengaruhi keputusan. Sehingga, pengungkapan risiko penting untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang cara perusahaan mengelola risiko yang dihadapi.

### ***Teori Agensi***

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi adalah hubungan antara manajer dan pemegang saham yang dilihat sebagai sebuah kontrak antara kedua belah pihak dimana pemegang saham adalah prinsipal yang akan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen yaitu manajer dan agen akan bertanggung jawab untuk bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi prinsipal. Seiring berjalannya perusahaan kemungkinan akan terjadi konflik kepentingan dimana agen menempatkan keinginannya diatas kepentingan prinsipal ketika agen berkeinginan memaksimalkan kepentingannya sendiri. Maka dari itu, prinsipal perlu melindungi kepentingannya dengan membangun sistem pemantauan salah satunya dengan pengungkapan (Darussamin *et al.*

2018). Berdasarkan teori agensi, pengungkapan dianggap sebagai mekanisme pemantauan dan menjadi salah satu cara untuk memitigasi masalah agensi, dimana manajer mengungkapkan informasi yang relevan untuk membantu investor memantau tindakan manajer dalam melaksanakan tugas dan menilai kemampuan manajer mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan mereka. Hal ini didukung oleh penelitian Wicaksono dan Adiwibowo (2017) bahwa pengungkapan risiko pada sektor perbankan menjadi faktor penting di pelaporan keuangan sebab dapat menginformasikan bagaimana risiko muncul, penanganan yang dilakukan perusahaan dan dampak risiko terhadap masa depan perusahaan.

### ***Pengungkapan Risiko Operasional***

Menurut peraturan BI No. 13/23/PBI/2011 risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sifat berbasis aset dari produk pembiayaan perbankan syariah seperti *murabahah*, *salam* dan *istisna'* dapat memunculkan bentuk risiko operasional dalam penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Seperti yang diungkapkan oleh Izhar dan Asutay (2010) bahwa risiko operasional cenderung signifikan dalam institusi yang menawarkan jasa keuangan syariah karena fitur kontrak dan lingkungan hukum yang berbeda dengan bank konvensional. Pemberian informasi tentang risiko operasional dapat meningkatkan kualitas struktur tata kelola bank, memperkuat kepercayaan sistem perbankan dan meningkatkan efisiensi ekonomi bank syariah (Neifar dan Jarboui 2018).

**Tabel 1:** Perbedaan Risiko Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional

	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Indikator/dimensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keberlanjutan bisnis</li><li>2. Sumber daya manusia</li><li>3. Teknologi informasi</li><li>4. Hukum dan ketidakpatuhan syariah</li><li>5. Sosial</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Karakteristik dan kompleksitas bisnis</li><li>2. Sumber daya manusia</li><li>3. Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung</li><li>4. Fraud</li><li>5. Kejadian eksternal</li></ol>
Produk perbankan	Produk lebih rentan terhadap risiko operasional karena fitur kontrak yang unik, sesuai prinsip syariah ( <i>Mudarabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Salam</i> )	Produk lebih rentan terhadap risiko pasar dan risiko kredit.
Peraturan regulator	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum</li><li>2. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum</li></ol>
Item pengungkapan	Belum ada standar khusus yang menerangkan item risiko operasional di Indonesia.	Item risiko operasional dijelaskan di surat edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi berbagai kelompok pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi wajib dan sukarela dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi karena kontrak spesifik antara bank syariah dan deposannya. Tidak seperti risiko pasar dan risiko kredit, menurut Radwan, Shakhathreh dan Blancone (2016) risiko operasional sulit untuk dievaluasi dan menghadapi masalah seperti kurangnya standarisasi tentang pengukuran dan pengungkapan yang dilaporkan, sehingga penelitian terdahulu

mengembangkan daftar pengungkapan risiko operasional dengan mengacu pada AAOIFI, Basel, IFSB dan laporan tahunan bank-bank. Kerangka daftar pengungkapan manajemen risiko operasional berfokus pada dimensi risiko personil, risiko teknologi informasi, risiko hukum, risiko keberlanjutan dan risiko sosial (Radwan *et al.* 2016). Sedangkan Archer, Karim dan Sundararajan (2010) menambahkan dimensi risiko kepatuhan syariah dan risiko hukum didalamnya.

### ***Tata Kelola Perusahaan***

Peran mendasar dari *shariah governance* adalah memastikan bahwa operasi kegiatan keuangan mematuhi nilai-nilai Islam dan hak-hak pihak yang terlibat tidak dilanggar. Struktur pengawasan dalam tata kelola bank syariah yang terdiri dari dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan syariah atau dewan syariah telah diterangkan peran masing-masing struktur pengawasan di Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009. Salah satu cara dimana perusahaan Islam dapat menampilkan kualitas tata kelola yang baik adalah dengan terlibat dalam transparansi dan pengungkapan yang lebih baik sehubungan dengan praktik-praktik tata kelola (Waleed, Albassam dan Ntim 2017).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### ***Kepemilikan Institusional***

Peran kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi lebih dari yang diwajibkan dan lebih cenderung membuat pengungkapan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham institusional. Oleh karena itu, pemegang saham institusi memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menetapkan peraturan terkait pengungkapan risiko (Ashfaq *et al.* 2016).

Struktur kepemilikan yang sering dijumpai di perbankan Indonesia hanya dua jenis yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko (Al Maghzom *et al.* 2016; Ashfaq *et al.* 2016; Neifar dan Jarboui 2018). Sedangkan penelitian kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional belum pernah dikaji, sehingga peneliti memilih memasukan variabel kepemilikan institusional ke dalam penelitian ini. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H1:** Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

### ***Komite Audit***

Peran peran komite audit dibutuhkan karena bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan sehingga komite audit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi prinsipal tersebut. Adanya komite audit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pimpinan mengungkapkan informasi keuangan dengan tidak dimanipulasi dan tidak bias (Al Maghzom *et al.* 2016). Reputasi baik komite audit ini akan mendukung transparansi. Artinya, independensi komite audit akan mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit (Al Maghzom *et al.* 2016; Ashfaq *et al.* 2016; Alkurdi *et al.* 2019) dan jumlah anggota komite audit (Nahar *et al.* 2016; Achmad dan Faisal 2017) berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi komite

audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H2:** Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

### ***Dewan Komisaris***

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi serta hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Fungsi komisaris independen untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku (IBI 2016). Independensi dewan akan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk pengungkapan informasi yang berkualitas untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan (Gago, Garcia dan Nieto 2018).

Penelitian Alkurdi *et al.* (2019) menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Semakin besar independensi seorang komisaris, semakin baik dalam menghadapi tuntutan pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pengungkapan risiko. Oleh karena itu, diprediksikan bahwa independensi dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko operasional. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H3:** Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

#### ***Dewan Pengawas Syariah***

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang direkomendasikan DSN-MUI yang bertugas mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, DPS memiliki tanggung jawab memberikan nasihat kepada dewan direksi, serta masukan terhadap lembaga keuangan Islam tentang masalah syariah yang memungkinkan bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS sebagai pemantau independen dalam membatasi pengambilan risiko yang berlebihan oleh dewan direksi dan memenuhi tujuan tata kelola internal yaitu transparansi pengungkapan informasi. Hasil penelitian Elamer *et al.* (2019) menunjukkan pengaruh keberadaan, jumlah anggota dan jumlah rapat DPS terhadap pengungkapan risiko operasional yang menunjukkan hasil positif dan signifikan. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh Neifar dan Jarboui (2018) bahwa keberadaan DPS berpengaruh negatif terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini serupa dengan penelitian Farook, Hassan dan Lanis (2011) dimana karakteristik DPS yang tinggi cenderung membuat peningkatan pengungkapan, karena DPS memberikan tekanan kepada manajer untuk terlibat dalam peningkatan pengungkapan. Adapun hipotesa yang diuji adalah sebagai berikut

**H4:** Karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko operasional.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling nonrandom dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah Bank Umum Syariah di Indonesia menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2014-2018 yang didalamnya mengandung informasi tentang manajemen risiko, terutama risiko operasional.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah periode tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam dan digunakan untuk menganalisis kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

### **Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

#### **Variabel Dependen**

##### ***Pengungkapan Risiko Operasional***

Penyusunan kerangka indeks pengungkapan risiko operasional menggunakan pendekatan standar pengungkapan wajib berdasarkan Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, parameter penilaian risiko operasional dilihat dari risiko inheren yang terdiri dari karakteristik dan kompleksitas bisnis; sumber daya manusia; teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; *fraud*; dan kejadian eksternal. Selain itu

menggabungkan item pengungkapan risiko operasional lain dari penelitian milik Ameer (2018) dan Neifar dan Jarboui (2018) yang memasukkan lima dimensi yaitu risiko personal, risiko teknologi dan sistem informasi, risiko hukum, risiko ketidakpatuhan syariah, dan risiko sosial.

Peneliti memasukkan informasi dimensi risiko hukum dan risiko ketidakpatuhan syariah kedalam indeks pengungkapan risiko operasional karena melihat ketidakpatuhan syariah menjadi risiko operasional terbesar yang dihadapi oleh bank syariah, seperti kegagalan produk Islami yang dianggap tidak sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan untuk risiko sosial bahwa bank-bank syariah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial atas bisnis operasional yang dijalankannya, sehingga perlu adanya informasi tentang program Qard Hasan, distribusi zakat dan upaya pengembangan masyarakat melalui dukungan kepada UMKM. Sehingga total item pengungkapan risiko operasional dalam penelitian ini berjumlah 45 item. Pengukuran indeks pengungkapan ini menggunakan pendekatan tidak berbobot (*unweighted*). Dimana nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian membagi total item yang diungkapkan dengan nilai maksimum dari seluruh item pengungkapan risiko operasional.

## **Variabel Independen**

### ***Kepemilikan Institusional***

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional (lembaga keuangan atau pun lembaga pembiayaan bukan bank) dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar di Bank Umum Syariah.

### ***Komite Audit Independen***

Independensi komite audit diukur dengan menghitung komposisi dari komite audit yang berasal dari luar Bank Umum Syariah terhadap jumlah anggota komite audit.

### ***Dewan Komisaris Independen***

Independensi dewan komisaris diukur dengan menghitung komposisi dari jumlah komisaris independen yang berasal dari luar dewan komisaris atau pihak Bank Umum Syariah dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris.

### ***Karakteristik Dewan Pengawas Syariah***

Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini diukur melalui pendekatan penelitian *Islamic Governance Score (IGS)* yang merupakan proksi dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah.

**Tabel 2:** Model Perhitungan IG-Skor

<b>Kode</b>	<b>Karakteristik IG-Skor</b>	<b>Keterangan</b>
SSB	Keberadaan anggota DPS	1 jika bank memiliki DPS, 0 jika tidak
NUM	Jumlah anggota DPS	1 jika bank memiliki 2 atau lebih anggota, 0 jika kurang dari itu
CROSS	Keberadaan lintas anggota DPS	1 jika ada, 0 jika tidak ada
PHD	Kualifikasi Doktor bagi anggota DPS	1 jika terdapat anggota DPS yang memiliki kualifikasi Doktor, 0 jika tidak ada
REP	Keberadaan ahli yang memiliki reputasi di DPS	1 jika ada, 0 jika tidak ada

Sumber: Farook dan Lanis (2007)

## **Variabel Kontrol**

### ***Ukuran Perusahaan***

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut teori agensi, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula informasi yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan perbankan syariah diproksikan dengan SIZE, umumnya literatur lain menggunakan logaritma natural dari total aktiva.

### ***Profitabilitas***

Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) bagi perusahaan. Perhitungan profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return of Asset (ROA)*, yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva.

## **Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23.

### ***Analisis deskriptif***

Metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terhadap obyek penelitian melalui data sampel atau populasi. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

### ***Uji asumsi klasik***

Uji asumsi klasik bertujuan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik regresi linier yang digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: (1) Uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen dan moderasi memiliki distribusi data yang normal atau tidak. (2) Uji multikolinieritas untuk melihat apakah ada situasi dimana ada korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya dalam model regresi. (3) Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varian yang konstan atau tidak, dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser. (4) Uji autokorelasi untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi.

### ***Pengujian hipotesis***

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan matematis untuk model regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{ORD} = \alpha + \beta_1\text{KPI} + \beta_2\text{KAI} + \beta_3\text{DKI} + \beta_4\text{DPS} + \beta_5\text{SIZE} + \beta_6\text{ROA} + \varepsilon$$

Dimana,

ORD : *Operational Risk Disclosure* (Pengungkapan Risiko Operasional)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_6$  : Koefisien regresi

$\varepsilon$  : Standar eror

KPI : Kepemilikan Institusional

KAI : Komite Audit Independen  
DKI : Dewan Komisaris Independen  
DPS : Karakteristik Dewan Pengawas Syariah  
SIZE : Ukuran Bank Umum Syariah  
ROA : Profitabilitas

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik Deskriptif**

Penelitian dilakukan khusus Bank Umum Syariah dengan jumlah sampel sebanyak 13 bank syariah periode tahun 2014 – 2018 yang lolos seleksi dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga total sampel sebanyak 65 bank syariah. Dari statistik deskriptif (Tabel 4) dapat dilihat bahwa rata-rata pengungkapan risiko operasional 71%, menandakan bahwa sebagian besar bank umum syariah di Indonesia telah melaksanakan pengungkapan risiko operasional di laporan tahunan mereka. Dari data sekunder laporan tahunan 13 bank umum syariah periode 2014-2018, Bank Victoria Syariah hanya mengungkapkan 24 item pengungkapan risiko operasional atau 53%. Sedangkan BNI Syariah memberikan pengungkapan lebih luas dengan jumlah 39 item pengungkapan atau 87% dari total 45 item pengungkapan di laporannya.

Nilai standar deviasi dari variabel kepemilikan institusional, komite audit independen, dewan komisaris independen dan karakteristik dewan pengawas syariah menunjukkan penyebaran yang cenderung homogen. Rata-rata karakteristik DPS sebesar 87,08% yang menunjukkan bahwa komponen DPS yang ada di bank umum syariah Indonesia telah memenuhi paling sedikit kriteria memiliki keberadaan anggota, jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan dan pengalaman.

**Tabel 4:** Statistik Deskriptif

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
ORD	65	.53	.87	.7102	.08908
KPI	65	.60	1.00	.9582	.09533
KAI	65	.29	1.00	.6163	.14077
DKI	65	.00	1.00	.6215	.16876
DPS	65	.60	1.00	.8708	.12465
SIZE	65	14.06	18.44	16.3666	1.28938
ROA	65	-.81	.07	-.0103	.10776
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

### **Pengujian Hipotesis**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik regresi linier yang digunakan. Pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model yang dibuat tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. *Goodness of fit* model regresi secara statistik dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F.

Pada hasil regresi linier berganda pada tabel 5 menunjukkan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,313 mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit independen, dewan komisaris independen, karakteristik dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan profitabilitas mampu menerangkan 31,3% pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia, sementara sisanya sebesar 68,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi dalam model ini. Hasil regresi menunjukkan signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti signifikan kuat sehingga model yang diajukan dapat dikatakan berkualitas baik.

**Tabel 5:** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	T hitung	Sig. t	Hasil Uji t	Keterangan
Konstanta	-.182				
KPI	.236	2.122	.038	Signifikan	H1 diterima
KAI	-.022	-.309	.759	Tidak signifikan	H2 ditolak
DKI	-.054	-.941	.351	Tidak signifikan	H3 ditolak
DPS	-.030	-.345	.731	Tidak signifikan	H4 ditolak
SIZE	.045	4.744	.000	Signifikan	
ROA	.013	.149	.882	Tidak signifikan	
R Square	.377				
Adjusted R Square	0.313				
F	5.853				
Sig.	0.000				

Sumber: Data yang diolah 2019

### ***Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional***

Variabel kepemilikan institusional (KPI) memiliki  $t_{hitung}$  2,122 dan nilai probabilitas 0,038. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh, signifikan dan searah antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Teori keagenan menerangkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih besar memiliki insentif ekstra untuk memonitor kebijakan pengungkapan. Mayoritas kepemilikan saham bank umum syariah di Indonesia adalah pihak institusional, sehingga pengendalian dan kekuasaan bank syariah berada di tangan investor institusi, dengan kata lain konsentrasi kepemilikan ini dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite. Peran kepemilikan institusional akan mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi, termasuk informasi tentang risiko operasional. Peningkatan pengungkapan informasi risiko operasional berdampak meningkatnya daya tarik pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan bahwa

peningkatan jumlah pemegang saham institusional dapat menentukan tingkat pengungkapan informasi perusahaan dan persyaratan untuk akses yang lebih luas ke informasi lain perusahaan.

### ***Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional***

Variabel komite audit independen (KAI) memiliki  $t_{hitung}$  -0,309 dan nilai probabilitas 0,759. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara komite audit independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Penelitian ini melihat ukuran komite audit yang dilihat dari jumlah anggota komite audit independen, karena komite audit yang independen dapat membantu dewan komisaris dalam memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (IBI 2016). Selain itu, reputasi baik komite audit independen dapat mendukung transparansi, yang mana mendorong manajemen dalam memberikan informasi lebih dari yang diwajibkan terutama pengungkapan risiko operasional di bank syariah. Hasil yang tidak mendukung memungkinkan bahwa jumlah komite audit independen hanya untuk mematuhi syarat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian Al Maghzom *et al.* (2016); Ashfaq *et al.* (2016); Alkurdi *et al.* (2019) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini, karena perbedaan proksi komite audit yang digunakan adalah jumlah rapat yang dilaksanakan.

### ***Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional***

Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki  $t_{hitung}$  0,941 dan nilai probabilitas 0,351. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara dewan

komisaris independen terhadap pengungkapan risiko operasional. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank telah melakukan praktik-praktik akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, pengungkapan, kemandirian dan praktik keadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak sedikitnya dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajer bank umum syariah dalam mengungkapkan item-item informasi risiko operasional dalam laporan tahunan. Pengangkatan komisaris independen di bank umum syariah Indonesia kemungkinan hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi semata dan tidak ditunjukkan terciptanya penguatan tata kelola perusahaan yang baik terkait transparansi. Komisaris independen juga tidak terlibat secara langsung mempengaruhi keputusan pemenuhan pengungkapan informasi risiko operasional, manajemen bank hanya melaksanakan praktik transparansi pengungkapan sesuai peraturan yang ada tanpa memperluas pengungkapan. Penelitian Alkurdi *et al.* (2019) menyatakan hasil yang berbeda dengan penelitian ini, yaitu dewan komisaris independen mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan wajib dan sukarela informasi risiko.

### ***Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Risiko Operasional***

Variabel karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) memiliki  $t_{hitung} -0,345$  dan nilai probabilitas 0,731. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan risiko operasional. Peran DPS di perbankan syariah Indonesia adalah menasihati, mengawasi dan memastikan operasional perusahaan agar patuh pada prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja DPS di laporan tahunan dimana rapat yang dilaksanakan tentang

agenda diskusi, konsultasi tentang pemenuhan prinsip syariah, pengawasan pengembangan produk baru, dan pengawasan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Penelitian Elamer *et al* (2019); Neifar dan Jarboui (2018) menyatakan bahwa kehadiran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko bank-bank Islam. Selain perbedaan proksi yang dipakai kemungkinan karakteristik DPS di perbankan syariah Indonesia masih belum memberikan dampak langsung dalam memenuhi tujuan tata kelola internal, yaitu transparansi informasi berbeda dengan fungsi DPS di bank-bank Islam di luar Indonesia.

## **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

### **Simpulan**

Tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia ternyata sudah baik dengan rata-rata 71,02% dari total 45 item. Hal ini mungkin disebabkan telah ada peraturan yang menjelaskan tentang penilaian risiko operasional yang diterangkan di Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum. Meski belum ada standar tersendiri dan penjelasan secara rinci tentang risiko operasional yang dihadapi bank umum syariah.

Prekursor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko operasional secara signifikan adalah kepemilikan institusional. Hal ini menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menggantikan kontrol yang dilakukan oleh pihak dewan dan komite untuk mendorong manajemen melaksanakan pengungkapan risiko operasional. Sedangkan struktur pengawasan tata kelola berupa komite audit independen, dewan komisaris independen dan kriteria dewan pengawas syariah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini mengartikan bahwa kualitas tata kelola

perbankan syariah di Indonesia masih belum terlibat dalam prinsip transparansi, yaitu penyediaan informasi yang lebih luas tentang risiko operasional.

### **Implikasi**

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kemajuan kajian tentang pengungkapan risiko operasional. Bagi regulator penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembuatan peraturan yang menekankan akan pentingnya risiko operasional. Selain itu, mempertimbangkan untuk menjelaskan definisi secara luas dan persyaratan tentang manajemen risiko operasional di lingkungan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat memotivasi manajemen bank syariah untuk secara sukarela mengungkapkan informasi risiko operasional, sehingga transparansi dapat dijalankan untuk kebutuhan para investor. Bank syariah perlu mengungkapkan kerangka kerja manajemen risiko operasional kepada pemangku kepentingan, agar mereka mengetahui proses pengelolaan risiko operasional termasuk bagaimana bank mengidentifikasi, menilai, memantau, mengelola dan mengendalikan risiko operasional. Penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah masih baru dan belum banyak dilakukan di Indonesia. Topik kajian ini dapat diteruskan untuk penelitian di masa depan dengan memperluas kajian, pemilihan variabel, dan indeks pengungkapan risiko operasional.

### **Keterbatasan**

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah di Indonesia masih jarang ditemukan, sehingga banyak literasi luar yang dipakai dalam penelitian ini. Penyusunan dan penggunaan indeks

pengungkapan risiko operasional berjumlah 45 item dalam penelitian ini mungkin terdapat kelemahan karena perbedaan konsep yang diciptakan.

## REFERENSI

- Abdallah, A. A, M. K Hassan, and P. L McClelland. 2015. "Islamic Financial Institutions, Corporate Governance, and Corporate Risk Disclosure in Gulf Cooperation Council Countries." *Journal of Multinational Financial Management*, 31 63-82.
- Achmad, T, and Oktarina, M Faisal. 2017. "Factors Influencing Voluntary Corporate Risk Disclosure Practices by Indonesian Companies." *Corporate Ownership & Control*, Vol. 14 (3-2) 286-292.
- Al Maghzom, A, K Hussainey, and D Aly. 2016. "Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence from Saudi Arabia." *Corporate Ownership and Control Journal*, Vol. 13 (2) 145-166.
- Alkurdi, A, K Hussainey, Y Tahat, and M Aladwan. 2019. "The Impact of Corporate Governance on Risk Disclosure: Jordanian Evidence." *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Vol. 23 (1) 1-16.
- Ameer, R. 2018. "Voluntary Operational Risk Management Disclosure by Islamic Banks in Muslim Majority Countries." Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3208380> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3208380> 1-36.
- Archer, S, R.A.A Karim, and V Sundararajan. 2010. "Supervisory, Regulatory, and Capital Adequacy Implications of Profit-Sharing Investment Accounts in Islamic Finance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 1 (1) 10-31.
- Aryani, D. N, and K Hussainey. 2017. "The Determinants of Risk Disclosure in The Indonesian Non-Listed Banks." *International Journal of Trade and Global Markets*, Vol. 10 (1) 58-66.
- Ashfaq, K, R Zhang, A Munaim, and N Razzaq. 2016. "An Investigation into The Determinants of Risk Disclosure in Banks: Evidence from Financial Sector of Pakistan." *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6 (3) 1049-1058.
- Barakat, A, and K Hussainey. 2013. "Bank Governance, Regulation, Supervision, and Risk Reporting: Evidence from Operational Risk Disclosures in European Banks." *International Review of Financial Analysis*, Vol. 30 254-273.

- Darussamin, A. M, M. M Ali, E. K Ghani, and A Gunardi. 2018. "The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Level of Risk Disclosure: Evidence from Malaysian Government Linked Companies." *Journal of Management Information and Decision Sciences*, Vol. 21 (1) 1-19.
- Elamer, A. A, C. G Ntim, and H. A Abdou. 2017. "Islamic Governance, National Governance, and Bank Risk Management and Disclosure in MENA Countries." *Business & Society* 1-42.
- Elamer, A. A, C. G Ntim, H. A Abdou, A Zalata, and M Elmagrhi. 2019. "The Impact of Multi-Layer Governance on Bank Risk Disclosure in Emerging Markets: The Case of Middle East and North Africa." *Accounting Forum*, Forthcoming .
- Ellili, N, and H Nobanee. 2017. "Corporate Risk Disclosure of Islamic and Conventional Banks." *Banks and Bank System*, Vol. 12 (3) 247-256.
- Falendro, A, Faisal, and I Ghozali. 2018. "Karakteristik Dewan Komisaris, Komite dan Pengungkapan Risiko Perusahaan." *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 (2) 115-124.
- Farook, S. Z, and R Lanis. 2007. "Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure." *International Conference on Islamic Economics and Finance*.
- Farook, S. Z, M. K Hassan, and R Lanis. 2011. "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 (2) 114-141.
- Gago, R. F, L, C Garcia, and M Nieto. 2018. "Independent Directors' Background and CSR Disclosure." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 1-11.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasina, G, M. R Nazar, and E Budiono. 2018. "The Influence of Board Commissioner Size, Leverage, and Firm Size to Enterprise Risk Management Disclosure." *e-Proceeding of Management*, Vol. 5 (2) 2402-2409.
- IBI. 2016. "Supervisi Manajemen Risiko Bank." In *Pendahuluan*, by Ikatan Bankir Indonesia IBI, 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29 DPbS.
- Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum.

- Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum.
- Indonesia. (2014). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51.
- Izhar, H, and M Asutay. 2010. "A Theoretical Analysis of The Operational Risk Framework in Islamic Banks." *Journal of Economics and Management*, Vol. 18 (1) 73-113.
- Jensen, M. C, and W. H Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (4) 305-360.
- Khalil, A, and M Maghraby. 2017. "The Determinants of Internet Risk Disclosure: Empirical Study of Egyptian L1sted Companies." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 32 (8) 746-767.
- Linsley, P. M, and P. J Shrivs. 2005. "Tranparency and The Disclosure of Risk Information in The Banking Sector." *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 13 (3) 205-214.
- Malim, N. A. K. 2015. "Islamic Banking and Risk Management: Issues and Challenges ." *Journal of Islamic Banking and Finance* 64-70.
- Mollah, S, M. K Hassan, O Al Farooque, and A Mobarek. 2017. "The Governance, Risk-Taking, and Performance of Islamic Banks." *J Financ Serv Res*.
- Nahar, S, M Azim, and C Jubb. 2016. "The Determinants of Risk Disclosure by Banking Institutions: Evidence from Bangladesh." *Asian Review of Accounting*, Vol. 24 (4) 426-444.
- Neifar, S, and A Jarboui. 2018. "Corporate Governance and Operational Risk Voluntary Disclosure: Evidence from Islamic Banks." *Research in International Business and Finance* 43-54.
- Oliveira, J, L Lima Rodrigues, and R Craig. 2011. "Voluntary Risk Reporting to Enhance Institutional and Oragnizational Legitimacy." *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 19 (3) 271-289.
- Radwan, M, M, Z Shakhathreh, and P. P Blancone. 2016. "Operational Risk Management Disclosure in Islamic Banks." *Capitolo 1*.

- Rosli, N. F, N. F Mohammed, and Z. M Sanusi. 2017. "The Determinants of Voluntary Risk Disclosure: The Case of Shariah Compliant Companies in Malaysia." *SHS Web of Conferences* 36 (2) 1-14.
- Sarwono, A. A, D. W Hapsari, and A Nurbaiti. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko." *e-Proceeding of Management*, Vol. 5 (1) 769-777.
- Susanti, R. D, Y Isbanah, and T. M Kusumaningrum. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Risk Managemnt Disclosure pada Bank Konvensional di BEI 2012-2016." *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis III* 503-514.
- Waleed, M, C. G Albassam, and Ntim. 2017. "The Effect of Islamic Values on Voluntary Corporate Governance Disclosure: The Case of Saudi Listed Firms ." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 (2) 1-28.
- Wicaksono, S. A, and A. S Adiwibowo. 2017. "Analisis Determinan Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)." *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6 (4) 1-14.

## Daftar Item Pengungkapan Risiko Operasional

No	Deskripsi Pengungkapan	Sumber
1	Skala usaha dan struktur organisasi bank	OJK
2	Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa	OJK
3	Aksi perusahaan dan pengembangan bisnis baru	OJK
4	Outsourcing	OJK; Ameer (2018)
5	Etika bisnis	Neifar dan Jarboui (2018)
6	Dewan menjelaskan peran direktur dalam departemen manajemen risiko	Ameer (2018)
7	Pernyataan tentang peran penasihat eksternal dalam praktik manajemen risiko	Ameer (2018)
8	Pemasaran atau kepuasan pelanggan atau boikot	Neifar dan Jarboui (2018)
9	Penerapan manajemen sumber daya manusia	OJK; Neifar dan Jarboui (2018)
10	Pernyataan tentang pengembangan integritas karyawan	Neifar dan Jarboui (2018)
11	Pernyataan tentang perekrutan, pelatihan dan pengembangan staf manajemen risiko	Ameer (2018)
12	Pernyataan tentang pemisahan tugas antar personel yang terlibat dokumentasi, pemrosesan transaksi dan pelaporan	Ameer (2018)
13	Praktik kerja dan keselamatan kerja dan adanya aktivitas serikat pekerja.	OJK; Ameer (2018)
14	Kegagalan karena faktor manusia/ human error	OJK; Elamer et al. (2017)
15	Kompleksitas teknologi informasi	OJK
16	Perubahan sistem teknologi informasi	OJK; Ameer (2018)
17	Kerentanan sistem teknologi informasi terhadap ancaman dan serangan teknologi informasi	OJK; Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
18	<i>Maturity</i> sistem teknologi informasi	OJK; Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
19	Kegagalan sistem teknologi informasi	OJK; Ameer (2018)
20	Keandalan infrastruktur pendukung	OJK; Ameer (2018)
21	Kecurangan internal - disebabkan oleh pegawai	OJK

22	Kecurangan eksternal - perampokan, pemalsuan cek, pembajakan data bank dan gangguan sistem komputer	OJK
23	Pernyataan tentang tindakan criminal yang terjadi di organisasi	Ameer (2018)
24	Evaluasi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko	OJK
25	Strategi dan proses manajemen risiko operasional	Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
26	Cakupan dan sifat sistem pelaporan risiko operasional	Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
27	Teknik transfer atau mitigasi risiko operasional	Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
28	Kontrol kualitas	OJK
29	Fungsi audit internal atau sistem pengendalian internal	Neifar dan Jarboui (2018); Ameer (2018)
30	Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam bank baik oleh SKMR maupun SKAI	OJK
31	Tanggungjawab manajemen untuk anti pencucian uang dan pembiayaan anti terorisme	OJK
32	Jumlah keputusan perdata dan/atau syariah yang tertunda terkait dengan validitas produk perbankan	Ameer (2018)
33	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank	OJK
34	Segala perubahan yang berhubungan dengan legalitas konsumen untuk membuat kontrak	Ameer (2018)
35	Penggunaan pengacara eksternal untuk kasus-kasus hukum yang diajukan oleh bank terhadap rekening yang menunggak	Ameer (2018)
36	Pernyataan tentang kepatuhan prinsip dan aturan syariah yang telah ditentukan Dewan Syariah	Ameer (2018)
37	Produk-produk bank syariah mencerminkan kepatuhan syariah	Ameer (2018)
38	Informasi tentang kontroversi akuntansi/ peraturan/undang-undang yang tidak sesuai dengan syariah	Ameer (2018)

39	Jumlah terkait pendapatan yang diperoleh dari produk islami yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan syariah	Ameer (2018)
40	Informasi tentang distribusi zakat	Ameer (2018)
41	Informasi tentang program Qard Hasan	Ameer (2018)
42	Pengembangan masyarakat dan pembiayaan investasi proyek yang mendukung UMKM	Ameer (2018)
43	Masalah terkait dengan produk bank, nasabah dan praktik bisnis bank	Neifar dan Jarboui (2018)
44	Kerusakan aktiva milik bank akibat bencana alam atau terorisme	Neifar dan Jarboui (2018)
45	Kesalahan pada eksekusi pekerjaan dan proses manajemen	Neifar dan Jarboui (2018)

---